

Judul : Data tidak sinkron, bantuan bencana bisa tidak tepat sasaran
Tanggal : Senin, 02 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Data Tidak Sinkron

Bantuan Bencana Bisa Tidak Tepat Sasaran

KOMISI X DPR menemukan ketidaksinkronan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas di daerah terkait terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Pencocokan data ini penting dilakukan agar penyaluran bantuan untuk korban bencana tidak keliru dan tepat sasaran.

Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya terdapat perbedaan data antara

dua lembaga milik Pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi. Terlebih, Presiden sudah menetapkan satu data bencana dari BPS.

"Kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka perlu melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah akan menyebabkan bantuan salah dan tidak tepat

sasaran," ujar Sofyan dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Sofyan, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil. "Kalau jumlah datanya lebih banyak, tapi ternyata korban yang terdampak lebih sedikit, itu muhazir atau berlebihan," ucap politikus PDIP ini mengingatkan.

Selain itu, Sofyan menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Karena penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek non fisik, belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Salah satunya, sebut dia, tentang pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua yang terdampak banjir. Sebab se-

lama ini masalah psikologis belum terlalu mendapat perhatian. Sofyan bilang, masalah ini akan menjadi catatan DPR dan akan dikumpulkan untuk mengetahui berapa yang terdampak dan bagaimana solusi pengiriman berbagai ahli psikologi. Tujuannya agar bisa menyelamatkan kembali jiwa bagi korban yang trauma terhadap banjir dan longsor tersebut.

Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di wilayah Sumatera khususnya Sumut, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.

"Tentunya pengawasan itu tidak hanya berupa angka," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR Martin Manurung menambahkan, perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Karena itu, pendataan

wilayah terdampak bencana hingga Maret harus dilakukan dengan presisi dan fokus pada wilayah yang paling parah terdampak.

Sebab kerusakan di beberapa lokasi tidak hanya meliputi rumah, tetapi juga ladang, toko, dan perubahan total lanskap. "Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusan," kata Martin dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026). ■ TF